



ANNUAL REPORT

Pelaksanaan Komitmen Perlindungan Pengelolaan
Lingkungan dan Sosial Proyek RBP REDD+ For Result
Periode 2014-2016 GCF Output 2

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2025

Nama Proyek	: RBP GCF Output II Kategori Pemanfaat II
Penerima Manfaat	: Provinsi Kalimantan Selatan
Nama Lemtara	: Penabulu Foundation
Judul Proposal	: Penguatan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim Melalui Penanganan Lahan Kritis dan Gangguan Kehutanan, serta Penguatan Perhutanan Sosial, Kelembagaan dan Kebijakan REDD+Prov Kalimantan Selatan
Periode pelaporan summary safeguard BPDH	: Tahun 2025 (Periode Oktober - Desember 2025)



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2025, Penabulu Foundation sebagai Lembaga Penyalur Dana (Lembara) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan berbagai kegiatan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip safeguard dalam implementasi program. Upaya tersebut mencakup penguatan aspek tata kelola, perlindungan lingkungan, serta inklusi sosial dalam setiap tahapan kegiatan program.

Dari aspek tata kelola dan kelembagaan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kehutanan telah menerbitkan sejumlah dokumen resmi dalam bentuk Surat Keputusan (SK) sebagai dasar legal pelaksanaan kegiatan, termasuk penunjukan pendamping kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta pembentukan tim penyusun Rancangan Teknis (RTK) RHL. Dokumen-dokumen ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dilaksanakan dalam kerangka kewenangan pemerintah daerah dan memiliki legitimasi kelembagaan yang jelas. Pada periode pelaporan tahun 2025 juga telah difasilitasi penyusunan Rancangan Teknis RHL seluas 100 hektare di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru, yang berada dalam wilayah kelola RHL Kayu Tangi, sebagai bagian dari perencanaan teknis implementasi rehabilitasi lahan.

Dari aspek perlindungan lingkungan, program memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan ekologis. Salah satu bentuk kepatuhan safeguard adalah memastikan bahwa pengadaan dan penanaman bibit menggunakan jenis tanaman lokal dan non-invasif, sehingga tidak menimbulkan risiko terhadap keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati setempat.

Dari aspek perlindungan sosial dan inklusivitas, program secara konsisten mengintegrasikan prinsip Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) dalam berbagai tahapan implementasi, termasuk rekrutmen tenaga kerja, pengadaan barang dan jasa, serta kegiatan sosialisasi dan konsultasi dengan masyarakat. Penabulu Foundation menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan dan non-diskriminasi, yang memastikan bahwa perempuan, laki-laki, serta kelompok rentan memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan program. Selama periode pelaporan, partisipasi pemangku kepentingan dalam berbagai kegiatan program tercatat sebanyak 1.274 peserta, terdiri dari 992 laki-laki (75,96%) dan 282 perempuan (28,43%). Data ini menunjukkan adanya keterlibatan perempuan yang signifikan dalam proses sosialisasi, konsultasi, serta kegiatan teknis program, meskipun peningkatan partisipasi perempuan tetap menjadi perhatian dalam implementasi program ke depan.

Program juga memperkuat standar integritas dan perlindungan sosial melalui komitmen untuk mencegah pelecehan seksual, eksploitasi, pekerja anak, serta berbagai bentuk perilaku tidak etis dalam lingkungan kerja program. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga diterapkan melalui publikasi terbuka terhadap peluang kerja, penerapan proses seleksi yang adil, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. BPD LH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPD LH mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.

ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan BPD LH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPD LH, serta standar safeguard mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan nasional melalui Pedoman *Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan BPD LH*.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Kalimantan Selatan dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPD LH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi standar ISP BPD LH. Pemprov Kalsel memperkuat komitmen ini penyediaan data, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi BPD LH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan membentuk kerangka pelaksanaan safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan Kalimantan Selatan.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPD LH

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPD LHI2022 Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPD LH

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPD LH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan masyarakat di Kalimantan Selatan.

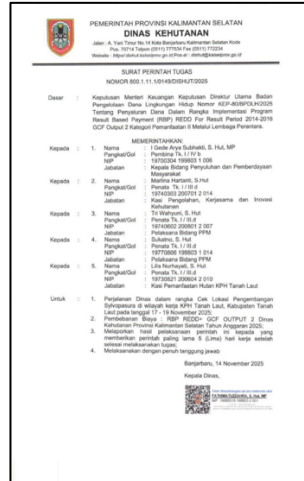
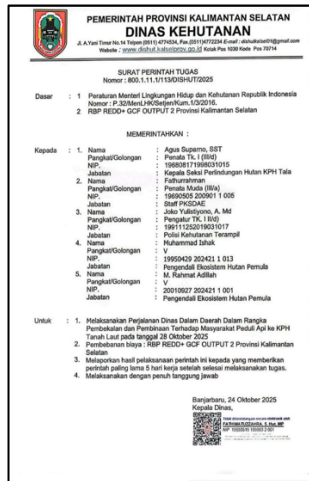
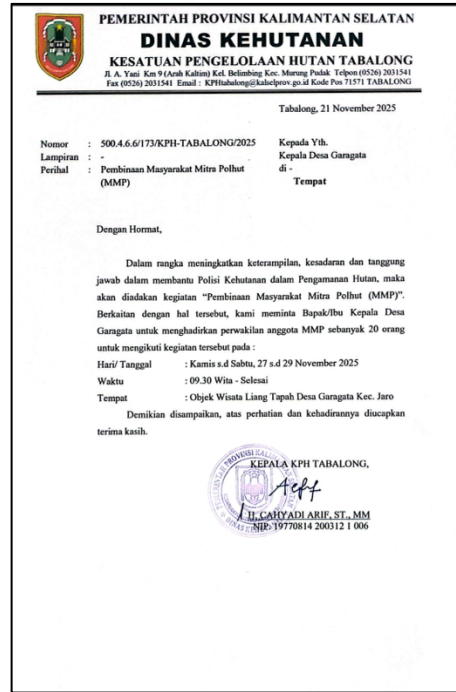
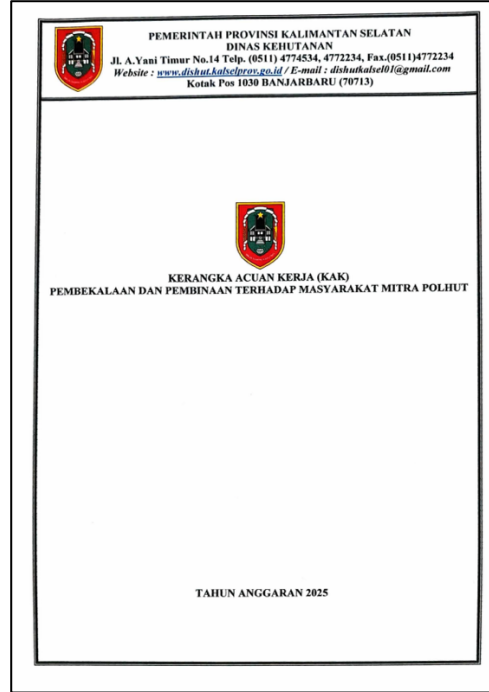
KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPD LH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPD LH, yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan:

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																																																																																
<p>ISP 1. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Akuntabilitas</p>	<p>Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS BPD LH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang diterbitkan oleh LH/K dan BPD LH, Berikut adalah dasar kepatuhan terhadap Hukum dan Akuntabilitas yang mendasari Program RBP REDD+ Kalimantan Selatan:</p> <p>1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023</p> <div style="text-align: center;">  <p>- 4 -</p> </div> <p style="text-align: center;"> <small>LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II *RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION*</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>ALOKASI PEMANFAATAN DANA UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II *RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION*</small> </p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>*Estimasi Alokasi Dart Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Papua</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>2</td><td>Kalimantan Tengah</td><td>5.137.209</td></tr> <tr><td>3</td><td>Kalimantan Timur</td><td>4.691.093</td></tr> <tr><td>4</td><td>Sumatera Barat</td><td>3.587.043</td></tr> <tr><td>5</td><td>Kalimantan Selatan</td><td>3.459.298</td></tr> <tr><td>6</td><td>Sulawesi Tengah</td><td>2.808.258</td></tr> <tr><td>7</td><td>Papua Barat</td><td>2.663.149</td></tr> <tr><td>8</td><td>Kalimantan Utara</td><td>2.660.468</td></tr> <tr><td>9</td><td>Kalimantan Barat</td><td>2.506.965</td></tr> <tr><td>10</td><td>Jambi</td><td>2.287.204</td></tr> <tr><td>11</td><td>Riau</td><td>2.065.102</td></tr> <tr><td>12</td><td>Sumatera Utara</td><td>1.750.752</td></tr> <tr><td>13</td><td>Aceh</td><td>1.750.396</td></tr> <tr><td>14</td><td>Sulawesi Tenggara</td><td>1.544.414</td></tr> <tr><td>15</td><td>Maluku</td><td>1.173.431</td></tr> <tr><td>16</td><td>Maluku Utara</td><td>1.131.119</td></tr> <tr><td>17</td><td>Sulawesi Selatan</td><td>945.884</td></tr> <tr><td>18</td><td>Sulawesi Barat</td><td>812.166</td></tr> <tr><td>19</td><td>Bengkulu</td><td>737.255</td></tr> <tr><td>20</td><td>Sumatera Selatan</td><td>692.253</td></tr> <tr><td>21</td><td>Jawa Timur</td><td>441.058</td></tr> <tr><td>22</td><td>Gorontalo</td><td>414.883</td></tr> <tr><td>23</td><td>Sulawesi Utara</td><td>402.439</td></tr> <tr><td>24</td><td>Nusa Tenggara Timur</td><td>397.159</td></tr> <tr><td>25</td><td>Nusa Tenggara Barat</td><td>284.482</td></tr> <tr><td>26</td><td>Bangka Belitung</td><td>227.493</td></tr> <tr><td>27</td><td>Lampung</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>28</td><td>Jawa Tengah</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>29</td><td>Kepulauan Riau</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>30</td><td>Jawa Barat</td><td>205.488</td></tr> <tr><td>31</td><td>Bali</td><td>205.488</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"> <small>MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 TENTANG</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II *RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION*</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</small> </p> <p style="text-align: center;"> <small>MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,</small> </p> <p>Menimbang : a. bahwa Indonesia telah memperoleh <i>Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund (GCF)</i> sebesar USD 103,8 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tiga) Output;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. bahwa pelaksanaan kegiatan <i>Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2</i> untuk Kategori Pemanfaatan II “<i>Result Based Payment for Verified Emission Reduction</i>” perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi;</p> <p style="padding-left: 20px;">c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Alokasi Pemanfaatan Dana <i>Results Based Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2</i> untuk Kategori Pemanfaatan II “<i>Result Based Payment for Verified Emission Reduction</i>”;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;</p> <p style="padding-left: 20px;">2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas</p> <p>Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPD LH.</p> <p>Seluruh entitas pelaksana diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan ketentuan audit.</p>	No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dart Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)	1	Papua	5.137.209	2	Kalimantan Tengah	5.137.209	3	Kalimantan Timur	4.691.093	4	Sumatera Barat	3.587.043	5	Kalimantan Selatan	3.459.298	6	Sulawesi Tengah	2.808.258	7	Papua Barat	2.663.149	8	Kalimantan Utara	2.660.468	9	Kalimantan Barat	2.506.965	10	Jambi	2.287.204	11	Riau	2.065.102	12	Sumatera Utara	1.750.752	13	Aceh	1.750.396	14	Sulawesi Tenggara	1.544.414	15	Maluku	1.173.431	16	Maluku Utara	1.131.119	17	Sulawesi Selatan	945.884	18	Sulawesi Barat	812.166	19	Bengkulu	737.255	20	Sumatera Selatan	692.253	21	Jawa Timur	441.058	22	Gorontalo	414.883	23	Sulawesi Utara	402.439	24	Nusa Tenggara Timur	397.159	25	Nusa Tenggara Barat	284.482	26	Bangka Belitung	227.493	27	Lampung	205.488	28	Jawa Tengah	205.488	29	Kepulauan Riau	205.488	30	Jawa Barat	205.488	31	Bali	205.488
No.	Provinsi	*Estimasi Alokasi Dart Total RBP USD 93,4jt (dalam USD)																																																																																															
1	Papua	5.137.209																																																																																															
2	Kalimantan Tengah	5.137.209																																																																																															
3	Kalimantan Timur	4.691.093																																																																																															
4	Sumatera Barat	3.587.043																																																																																															
5	Kalimantan Selatan	3.459.298																																																																																															
6	Sulawesi Tengah	2.808.258																																																																																															
7	Papua Barat	2.663.149																																																																																															
8	Kalimantan Utara	2.660.468																																																																																															
9	Kalimantan Barat	2.506.965																																																																																															
10	Jambi	2.287.204																																																																																															
11	Riau	2.065.102																																																																																															
12	Sumatera Utara	1.750.752																																																																																															
13	Aceh	1.750.396																																																																																															
14	Sulawesi Tenggara	1.544.414																																																																																															
15	Maluku	1.173.431																																																																																															
16	Maluku Utara	1.131.119																																																																																															
17	Sulawesi Selatan	945.884																																																																																															
18	Sulawesi Barat	812.166																																																																																															
19	Bengkulu	737.255																																																																																															
20	Sumatera Selatan	692.253																																																																																															
21	Jawa Timur	441.058																																																																																															
22	Gorontalo	414.883																																																																																															
23	Sulawesi Utara	402.439																																																																																															
24	Nusa Tenggara Timur	397.159																																																																																															
25	Nusa Tenggara Barat	284.482																																																																																															
26	Bangka Belitung	227.493																																																																																															
27	Lampung	205.488																																																																																															
28	Jawa Tengah	205.488																																																																																															
29	Kepulauan Riau	205.488																																																																																															
30	Jawa Barat	205.488																																																																																															
31	Bali	205.488																																																																																															

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p data-bbox="448 226 1374 331">2. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund (GCF) Output 2 – Lemtara dan Pedoman ESMS Yayasan Penabulu 2021</p> <div data-bbox="448 398 906 1021">  <p data-bbox="496 456 847 517">Pedoman Operasional Program RBP REDD+ GCF Output 2</p> <p data-bbox="496 566 727 584">DISUSUN OLEH YAYASAN PENABULU</p> </div> <div data-bbox="965 405 1422 1021">  <p data-bbox="1166 566 1353 701">PENABULU ESMS ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT SYSTEM 2021</p> <p data-bbox="1166 801 1283 835">PENABULU FOUNDATION</p> </div> <div data-bbox="448 1070 906 1760">  <p data-bbox="520 1339 842 1417">PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN HIDUP (BPDH)</p> <p data-bbox="533 1429 829 1451">ENVIRONMENTAL AND SOCIAL MANAGEMENT SYSTEM (ESMS) MANUAL OF INDONESIAN ENVIRONMENT FUND</p> </div> <p data-bbox="932 1055 1433 1559">Lembaga Perantara (Lemtara) menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2. SOP ini disepakati bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memastikan keselarasan tata kelola, kejelasan alur kerja, dan kepastian prosedur pada seluruh tahapan implementasi, serta disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup.</p> <p data-bbox="932 1592 1433 1861">SOP menjadi acuan bagi Lemtara dan Penerima Manfaat dalam mengelola dan mengadministrasikan dana proyek secara tertib, transparan, dan akuntabel. SOP dan POP mengatur tata kelola proyek, mekanisme penyaluran dana, pengelolaan kegiatan, koordinasi, serta persyaratan administratif yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program.</p> <p data-bbox="448 1895 1433 2029">Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada Pedoman BPDH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDH No. 03/BPDH/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards).</p>

3. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)



ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan yang disusun sebelum pelaksanaan kegiatan merupakan bagian dari dokumen perizinan atau persetujuan resmi dari instansi yang berwenang.

Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas Program RBP REDD+ GCF Output 2 dipastikan telah memperoleh persetujuan administratif, berada dalam koridor kewenangan pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Dokumen tersebut juga berfungsi sebagai bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah

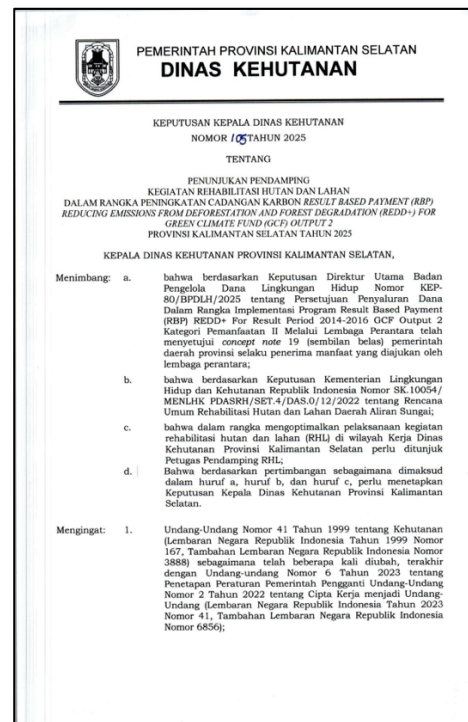
Pada periode ini terdapat Kegiatan yang berjalan:

- 1.1.1.1. Penyusunan/ Revisi RPHJP di 4 KPH
- 1.1.2.2. Patroli pengamanan hutan
- 1.1.2.4. Pembekalan dan pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan 1 UPT Tahura
- 1.1.2.5. Pembinaan MMP
- 1.2.1.1 Penyusunan RKP RHL
- 1.2.2.1 Penanaman (P0)
- 1.2.2.4. Pengawasan Kegiatan RHL
- 2.1.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM KPS terkait operasionalisasi PS
- 2.1.2.2. Pengembangan Silvopastoral
- 3.1.1.3. Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan RE DD+ di Kalsel
- 3.1.1.6. Supporting sekretariat PokjaREDD+
- 3.3.3.2. Pengadaan Barang untuk penyusunan peta jalan proklam Provi nsi Kalimantan selatan

4. Dokumen persetujuan dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemrov Kalimantan Selatan dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat)

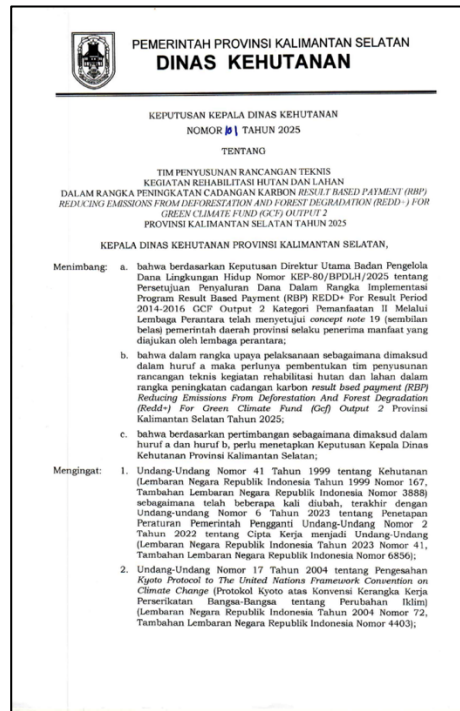
Sebagai bagian dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat. Periode 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menerbitkan beberapa **Surat Keputusan (SK)** yang menjadi dasar legal, sekaligus menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Selatan.

- a) SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penunjukan Pendamping Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)



SK ini menetapkan personel pendamping yang bertugas memberikan fasilitasi teknis, pendampingan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan RHL di tingkat tapak. Penunjukan pendamping tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa proses implementasi kegiatan oleh kelompok penerima manfaat berjalan sesuai dengan rencana kerja, standar teknis rehabilitasi hutan dan lahan, serta prinsip-prinsip akuntabilitas dan keberlanjutan program.

b) SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Tim Penyusun Rancangan Teknis Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)



6
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN
LAHAN (RHL) DALAM RANGKA PENINGKATAN
CADANGAN KARBON RESULT BASED
PAYMENT (RBP) REDD+ FOR GREEN CLIMATE
FUND (GCF) OUTPUT 2 PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2025

DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN
RANCANGAN TEKNIS KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Fahimatuz Zahra, S.Hut,MP	Penanggung Jawab Teknis	Kepala Dinas
2.	Ir. Alip Winarto, S.Hut,M.Si	Ketua Tim Teknis	Kepala Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3.	Muslim, S.Hut, M.Hut	Narahubung	Kepala Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
4.	Althar Peber P.P, S.Hut	Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
5.	Ali Masduq, S.Hut, M.Hut	Anggota	Staf Seksi Konservasi Tanah dan Air
6.	Budi Agung	Anggota	Staf Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan
7.	Antung Supian Rosali, S.Hut	Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
8.	Isnan Ma'rief, S.Hut	Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
9.	Riswan Muhammad, S.Kom	Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
10.	Andy Sanjaya, S.Pd	Anggota	Staf Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,
FATHIMATUZZAHRA


Surat Keputusan ini menetapkan pembentukan tim yang bertanggung jawab dalam penyusunan dokumen Rancangan Teknis (Rantek) kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Tim yang dibentuk terdiri dari unsur teknis di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan serta pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan teknis kegiatan RHL disusun secara sistematis, berbasis data dan kondisi tapak, serta mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berlaku. Dokumen Rancangan Teknis yang dihasilkan menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, termasuk dalam penentuan lokasi, jenis tanaman, pola tanam, serta tahapan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.

5. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program (kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal)

Dokumen legalitas kelompok MMP dan MPA yang dilatih pada periode 2025, masih belum terkumpul. Dokumen legalitas ini akan dilengkapi pada pelaporan tahun 2026.

6. Dokumen Persetujuan untuk Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Tapak (*peminjaman Aula, ketersediaan menghadiri undangan*)

 **PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG**
KECAMATAN JARO
KANTOR KEPALA DESA GARAGATA
Alamat : Jl. P.H. M. Noor Garagata RT. 03 Kecamatan Jaro

Tabalong, 21 November 2025


Nomor : 414/KDG/PEM/005/11/2025 Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala KPH Tabalong
Perihal : Balasan Undangan Pembinaan MMP di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala KPH Tabalong Nomor : 500.4.6.6/173/KPH-TABALONG/2025 tanggal 21 November 2025 Perihal : Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP), yang mana kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, kesadaran dan tanggung jawab dalam membantu Polisi Kehutanan dalam Pengamanan Hutan, maka dengan ini kami menyampaikan bahwa bersedia dan siap hadir untuk mengikuti kegiatan tersebut yang dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis s.d Sabtu, 27 s.d 29 November 2025
Waktu : 09.30 Wita - Selesai
Tempat : Objek Wisata Liang Tapah Desa Garagata Kec. Jaro

Demikian Surat Balasan ini kami sampaikan, atas perhatian dan keahliannya diucapkan terima kasih.


MIDRA

 **PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU**
KECAMATAN MANTEWE
DESA EMIL BARU
Alamat : J. Lumpang-Betulon KM 91 RT 03 Dusun II Desa Emil Baru Kec. Mantewe Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan KP 72211 Email: EmilBaru@desaemilbaru.com Telp. (0511) 591841-93

Emil Baru, 23 Oktober 2025


Nomor : B/000.1.1/070/ISB/MPA-EMB/X/2025
Lampiran : -
Hal : Balasan Undangan Pembekalan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api


Yth. Kepala KPH Kusan, Batulicin
Di -
Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Nomor 500.4.6.6/464/KPH/KS Tanggal 22 Oktober 2025 Perihal Undangan Pembekalan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api, yang bertujuan untuk meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, Kami dari MPA Emil Baru dengan ini menyampaikan bahwa kami bersedia dan siap hadir untuk mengikuti yang akan di laksanakan pada:

Hari/Tgl : Selasa, 04 November 2025
Waktu : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Kantor Desa Emil Baru Kecamatan Mantewe

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan Kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.


BAHRUDIN

 **PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**
KECAMATAN PULAU LAUT UTARA
DESA MEGASARI
Alamat : Jalan Banjarbaru RT 004/RW 002, Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru
Provinsi Kalimantan Selatan - Kota Plo. 72114 Email: megasarodesa@gmail.com

Kotabaru, 4 November 2025


Nomor : 230/MGS-2009/2025 Kepada :
Lampiran : - Kepala :
Perihal : Balasan Undangan Pembekalan dan Pembinaan MPA Yth. Kepala KPH Pulau Laut Sebuku di -
Tempat


Dengan hormat,

Menindak lanjut surat dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 500.4.6.7/246/KPH-PLS/2025 tanggal 21 Oktober 2025 perihal Undangan Pembekalan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA), yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran hutan dan lahan, kami dari MPA Megasari dengan ini menyampaikan bahwa kami bersedia dan siap hadir untuk mengikuti yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 November 2025
Waktu : 09.30 Wita s.d selesai
Tempat : Kantor Desa Megasari, Kecamatan Pulau Laut Utara

Demikian surat balasan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.


ALIMUKDIN

 **PEMERINTAH KOTA BANJARBARU**
KECAMATAN LIANG ANGGANG
KELURAHAN LANDASAN ULIN UTARA
Alamat : Jl. Sukamara RT.002 RW.002, Kel. Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Prov. Kalimantan Selatan 70723
e-mail : pem@kel-landasanulinutara.banjarbaru.go.id
website : www.kel-landasanulinutara.banjarbaru.go.id


Banjarbaru, 22 Oktober 2025

Nomor : 000/140-1/SET/Kel. LAURA
Lampiran : -
Hal : Surat Izin Peminjaman Aula Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan di -
Tempat

Berdasarkan Surat permohonan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 500.4.7.1/1402/LKPH-KAYU TANGGI/2025 tanggal 21 Oktober 2025 tentang peminjaman tempat untuk Pelaksanaan kegiatan RBP REDD + GCF subpui 2 Pembekalan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan UPT tahura Sultan Adam yang akan dilaksanakan pada hari/tanggal kamis, 23 Oktober 2025, maka dengan ini kami kantor kelurahan Landasan Ulin Utara memberikan izin peminjaman aula sebagai ruang acara.

Demikian surat balasan permohonan dari kami, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Besar harapan kami kepada panitia penyelenggara untuk dapat menjaga kebersihan dan ketertiban Lokasi.

Demikian disampaikan untuk bahan selanjutnya, atas perhatian diucapkan terima kasih.


AULIA ARIEF DAYANI, S.Sos
Pembina Tk. I
NIP. 19811104 201001 1 009

Sebagai bagian dari pemenuhan aspek kepatuhan terhadap persetujuan pelaksanaan kegiatan serta dukungan pemangku kepentingan di tingkat tapak, 8 Pemerintah Desa yang dilibatkan telah menerbitkan surat resmi sebagai tanggapan atas undangan dari KPH terkait pelaksanaan kegiatan Pembinaan Masyarakat Mitra Polhut (MMP) maupun Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA).

ISP

Deskripsi Kepatuhan

Dokumen ini menjadi bukti adanya dukungan dan persetujuan dari pemerintah desa sebagai representasi masyarakat setempat terhadap pelaksanaan kegiatan program. Selain itu, surat tersebut juga mencerminkan adanya koordinasi yang baik antara pengelola program, unit pengelola hutan (KPH), serta pemerintah desa dalam memastikan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan dan perlindungan hutan.

7. Rangkaian Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis RHL

a) Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi

LEMBAR PENGESAHAN
RANCANGAN KEGIATAN PENANAMAN
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN (RHL)
MENDUKUNG PROGRAM REDD+
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025

Kelurahan	:	Cempaka
Kecamatan	:	Cempaka
Kota	:	Banjarbaru
Provinsi	:	Kalimantan Selatan
Luas	:	100 Ha
Nomor	:	01/RANTEK/REDD+/2025

DISAHKAN

Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Selatan



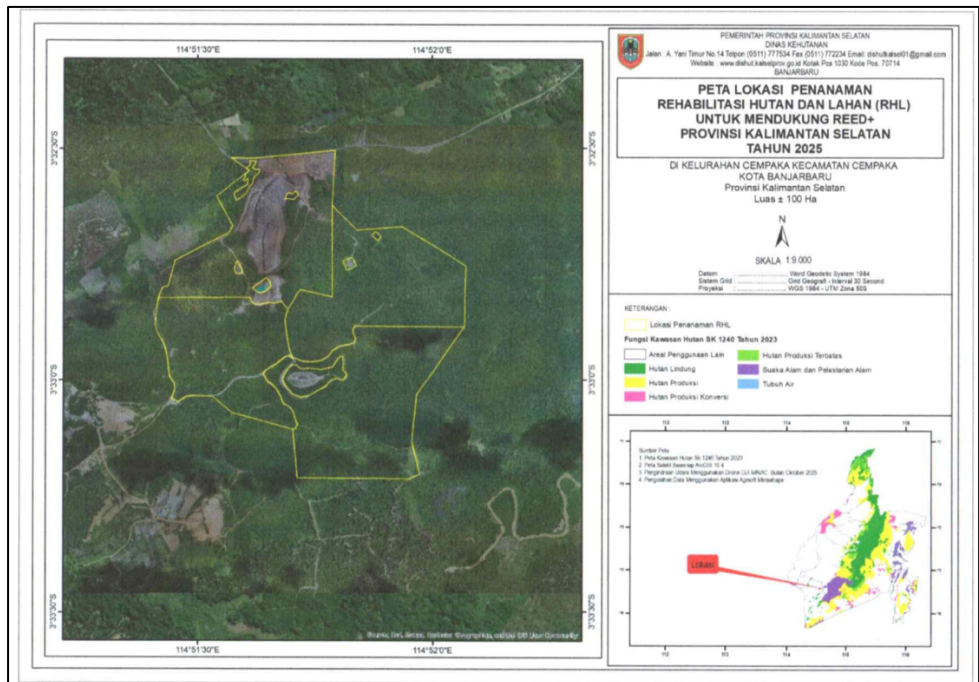
Fathimatuzzahra, S.Hut, MP
NIP. 19680519 199903 2 001

DISUSUN

Kepala Bidang PDASRHL Dinas Kehutanan
Provinsi Kalimantan Selatan



Ir. Alip winarto, S.Hut, M.Si
NIP. 19700615 199803 1 013



Periode tahun 2025, telah selesai di fasilitasi penyusunan rancangan teknis RHL seluas 100 Ha di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Banjarbaru yangh masuk di wilayah kelola RHL Kayu Tangi.

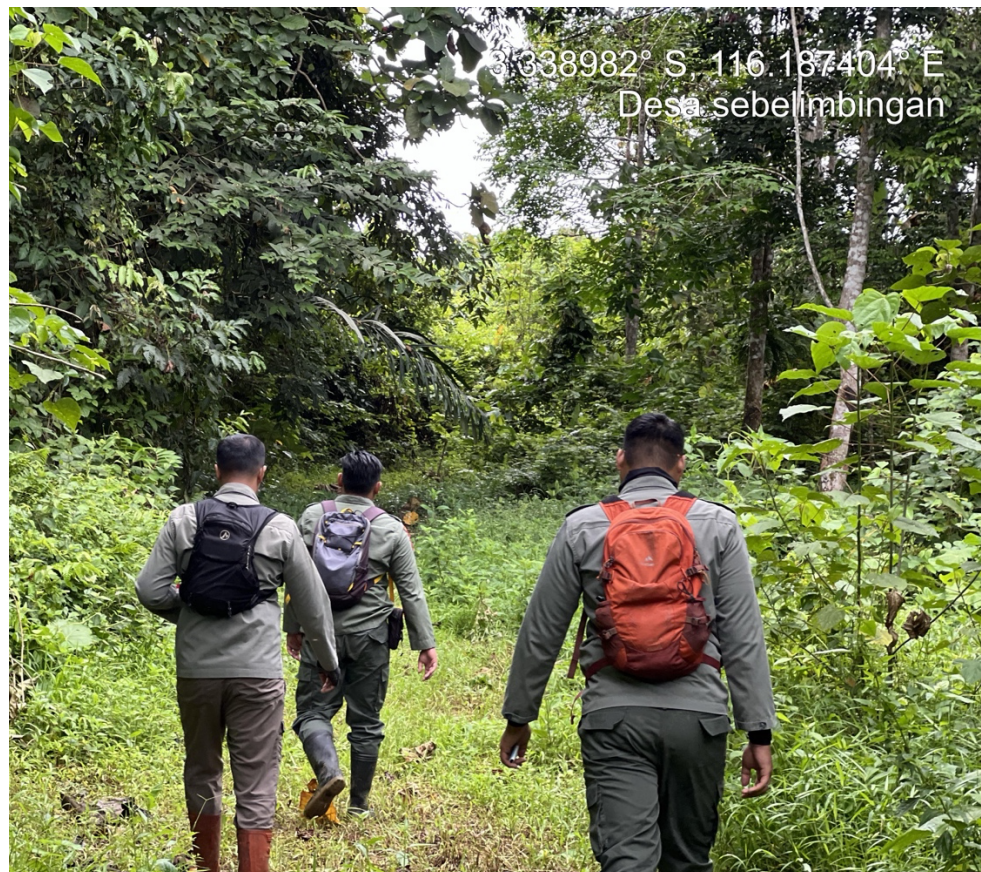
ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Penyusunan rancangan teknis ini menjadi tahapan penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan direncanakan secara sistematis, berbasis kondisi tapak, serta mengacu pada standar teknis yang berlaku. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi acuan operasional dalam pelaksanaan kegiatan RHL di lapangan</p> <p>8. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPD LH Baik di Tingkat Nasional dan Provinsi</p> <p>Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.</p> <p>Di provinsi Kalimantan Selatan, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat nasional dan provinsi untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara staf di tingkat provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan setiap kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi.</p>
<p>ISP 2. Ketenagakerjaan dan Kondisi Kerja</p>	<p>1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="448 1173 922 1821"> </div> <div data-bbox="954 1173 1428 1821"> </div> </div> <p>SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan prosedur patroli, mencakup standar keselamatan dan langkah mitigasi risiko.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan yang memadai. Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan kerja dalam kegiatan patroli.</p>
	<p>2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan Perlengkapan yang Berkaitan dengan K3.</p> <p>a) <u>Penggunaan alat pelindung diri (sepatu boot dan sarung tangan) dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan</u></p>  <p>The top photograph shows a worker wearing a colorful patterned long-sleeved shirt, shorts, and black rubber boots. He is using a long-handled tool to dig a hole in the soil. The bottom photograph shows two workers. One is wearing a green long-sleeved shirt, red pants, and black rubber boots, holding a small container. The other is wearing a blue long-sleeved shirt, blue pants, and black rubber boots, and is using a long-handled tool to dig a hole. Both workers are wearing gloves. The background shows a forest rehabilitation site with young trees and blue markers.</p>

ISP

Deskripsi Kepatuhan

b) Penggunaan alat pelindung diri (sepatu boot dan sarung tangan) dalam kegiatan patroli pengamanan dan kebakaran hutan dan lahan





Kegiatan patroli memiliki risiko yang cukup besar, khususnya kecelakaan kerja. Maka dari itu Penabulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara aktif mendorong UPTD pelaksana untuk melakukan short briefing keselamatan serta memastikan penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dalam setiap kegiatan patroli.

Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan memberikan pengarahan singkat mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, dan langkah tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh personel mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan kecelakaan di lapangan.

3. Dokumentasi Kesetaraan Kesempatan dan Non-Diskriminasi (ToR rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi) dan publikasi)

The screenshot displays the Penabulu Foundation website with a navigation menu on the left and a grid of job openings on the right. The job openings are categorized as 'LOWONGAN KERJA' (Job Vacancies) and include the following details:

- REDD+ Project Coordinator – Result Base Payment (RBP) Riau**: 25 Juli 2025
- Administration Staff – Result Base Payment (RBP) Kalimantan Selatan**: 25 Juli 2025
- Koordinator Keuangan – Result Base Payment (RBP) Kalimantan Selatan**: 25 Juli 2025
- Koordinator Program – Result Base Payment (RBP) Kalimantan Selatan**: 25 Juli 2025
- Staf Monev / Asisten Program RBP Kalimantan**
- Administration Staff REDD+ – Result Base Payment**

The screenshot displays the Penabulu Foundation website with a navigation menu on the left and detailed recruitment information on the right. The information includes:

- Memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 dalam bidang manajemen keuangan, administrasi atau akuntansi maupun sejenisnya.
- Memiliki pengalaman kerja dalam mengelola keuangan program bantuan pembangunan selama minimal 1 tahun.

Informasi pelamar

Pelamar dapat mengirimkan lamarannya ke email hr@penabulu.id paling lambat tanggal 07 Agustus 2025 pukul 17.00 waktu Jakarta. Silakan tulis "Administration Staff RBP Kalimantan Selatan – Nama Anda" di subjek email. Lamaran harus menyertakan:

- Cover letter
- CV (mohon menambahkan informasi tiga kontak referensi di dalam CV, disertakan nomor handphone dan email)

Nilai-Nilai dan Komitmen Yayasan Penabulu

Yayasan Penabulu berkomitmen untuk mencegah segala jenis perilaku yang tidak diinginkan di tempat kerja termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, kurangnya integritas dan pelanggaran keuangan; dan berkomitmen untuk mempromosikan kesejahteraan anak-anak, remaja, orang dewasa, dan penerima manfaat yang bekerja sama dengan Yayasan Penabulu. Yayasan Penabulu mengharapkan semua staf dan sukarelawan untuk berbagi komitmen ini melalui kode etik kami. Yayasan Penabulu menempatkan prioritas tinggi untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki dan menunjukkan nilai-nilai diatas untuk bekerja bersama Yayasan Penabulu.

Semua tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Penabulu akan didasarkan pada pemeriksaan/ penyaringan yang sesuai untuk catatan kriminal dan pemeriksaan keuangan terkait dengan terorisme. Yayasan Penabulu akan meminta informasi kepada pelamar kerja melalui tempat kerja sebelumnya tentang temuan-temuan kekerasan seksual dan pelecehan seksual selama bekerja atau insiden-insiden yang sedang diseleksi. Ketika pelamar meninggalkan pekerjaannya, dengan mengirimkan lamaran, pelamar telah memahami prosedur rekrutmen dari Yayasan Penabulu.

Yayasan Penabulu berkomitmen untuk memastikan keberagaman dan kesetaraan gender dalam organisasi dan mendorong pelamar dari berbagai latar belakang untuk melamar.




Syarat dan Ketentuan


- Yayasan Penabulu dapat melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap calon Kandidat yang terpilih selama 3 hari kerja;
- Yayasan Penabulu hanya akan menghubungi kandidat yang terpilih;
- Yayasan Penabulu tidak bertanggung jawab atas informasi palsu yang didapatkan oleh para pelamar;
- Yayasan Penabulu tidak memungut biaya pembayaran yang berhubungan dengan proses rekrutmen;
- Harap diketahui bahwa pengajuan lowongan akan diperiksa oleh administrasi kami dan penerimaan pelamar akan ditentukan oleh syarat dan ketentuan yang di miliki oleh Yayasan Penabulu;
- Seluruh informasi yang telah direkrut harus dipenuhi secara tepat waktu sesuai dengan balasan waktu yang telah ditetapkan oleh Yayasan Penabulu.


Penabulu secara konsisten menerapkan prinsip kesetaraan kesempatan, nondiskriminasi, dan inklusivitas dalam seluruh proses rekrutmen tenaga kerja, pengadaan jasa, dan pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Komitmen ini dituangkan secara eksplisit dalam setiap dokumen Terms of Reference (ToR) maupun dokumen pengadaan, dengan memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan kesempatan berpartisipasi terbuka bagi perempuan dan laki-laki, kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang tanpa membedakan agama, etnis, usia, gender, maupun kondisi sosial ekonomi.

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Informasi kesempatan kerja juga dipublikasikan secara terbuka melalui situs resmi Penabulu sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan akses yang setara bagi seluruh pelamar. Selain itu, Penabulu menegakkan standar GEDSI dan perlindungan safeguard dengan menetapkan kebijakan pencegahan terhadap pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, pekerja anak, serta berbagai bentuk perilaku tidak etis di lingkungan kerja program. Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi juga disertai dengan pemeriksaan latar belakang, termasuk pengecekan catatan kriminal dan pemeriksaan terkait risiko pendanaan terorisme, guna memastikan bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam lingkungan yang profesional, aman, dan dapat dipercaya.</p> <p>Link contoh publikasi rekrutmen yang mendorong GEDSI, komitmen safeguard dan non diskriminasi: https://penabulufoundation.org/administration-staff-result-base-payment-rbp-kalimantan-selatan/</p>
	<p>4. Dokumentasi Pelaksanaan Sosialisasi Saluran dan Mekanisme Penanganan Keluhan</p> <p>Dalam setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara secara aktif menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan melalui pemaparan langsung kepada seluruh stakeholder serta memasang banner informasi mekanisme keluhan di lokasi kegiatan. Melalui sosialisasi ini, Lemtara memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami pentingnya penerapan K3, termasuk pencegahan pelecehan dan kekerasan seksual.</p> <p>Penerapan sosialisasi dan penyediaan kanal pengaduan secara konsisten ini bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah risiko kekerasan dan pelecehan, serta menjamin ketersediaan mekanisme pelaporan yang jelas, mudah diakses, dan responsif pada seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat.</p> 

ISP	Deskripsi Kepatuhan
<p>ISP 3. Efisiensi Sumber Daya dan Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup</p>	<p>1. Dokumentasi Manajemen Limbah Domestik yang Ditimbulkan Atas Pelaksanaan Kegiatan Bimtek, FGD, Workshop, Meeting dan Kegiatan Patroli, atau Limbah Lainnya Sehubungan dengan Pelaksanaan Proyek.</p>    <p>Implementasi kegiatan, telah menerapkan manajemen limbah domestik selama pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Kalimantan Selatan Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD, workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya.</p> <p>Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas pemilahan sampah, jika tidak tersedia, memastikan ada trasbag atupun kardus bekas untuk digunakan sebagai pemilah sampah. Selain itu pada acara juga menghimbau peserta kegiatan untuk memastikan limbah makanan, kemasan, dan sampah anorganik dikumpulkan dan dibuang sesuai prosedur yang berlaku di lokasi kegiatan.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan																																													
ISP 4. Kesehatan dan Keselamatan Masyarakat.	-																																													
ISP 5. Pembebasan Lahan, Rencana Pemukiman Kembali dan Pembatasan Penggunaan Lahan	-																																													
ISP 6. Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan	<p>1. Spesies Tanaman RHL Tidak Menggunakan Spesies Invasif</p>  <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="450 1467 865 2078" style="width: 48%;"> <p style="text-align: right; font-size: small;">Komplek Palapa, Jl. Palapa 2 No. 4, RT 11/RW 5, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12520 Telp./Fax: (021) 2273729 Email: info@penabul.org / www.penabul.org</p> <p style="text-align: center;">BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Nomor : 003/BA/PB-GCF/2025</p> <p>Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bibit untuk keperluan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 002/BA/PB-GCF/2025, yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama : Agustin A. Mustika Jabatan : Koordinator Program - Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Selatan <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Pena Bulu pada Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.</p> <ol style="list-style-type: none"> Nama : Mamat Hikmat Jabatan : Direktur CV CIPUTRI <p>Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV CIPUTRI selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.</p> <p>Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA menerima hasil Pekerjaan Pengadaan Bibit untuk keperluan Penanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan PO-PO-374532-251121-1 tanggal 21 November 2025.</p> <p>Dengan rincian berupa :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Bibit</th> <th>Spesifikasi</th> <th>Jumlah</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Mangga</td> <td>- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Bersertifikat dan label biru</td> <td>7.821</td> <td>Batang</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Alpukat</td> <td>- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 70 cm - Bersertifikat dan label biru</td> <td>6.257</td> <td>Batang</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Matoa</td> <td>- Bibit Seeding - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Non sertifikat</td> <td>2.085</td> <td>Batang</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Nangka</td> <td>- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Bersertifikat dan label biru</td> <td>1.564</td> <td>Batang</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Cempedak</td> <td>- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 70 cm - Non sertifikat</td> <td>1.564</td> <td>Batang</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">3</p> </div> <div data-bbox="1024 1467 1437 2078" style="width: 48%;"> <p style="text-align: right; font-size: small;">Komplek Palapa, Jl. Palapa 2 No. 4, RT 11/RW 5, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan 12520 Telp./Fax: (021) 2273729 Email: info@penabul.org / www.penabul.org</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Bibit</th> <th>Spesifikasi</th> <th>Jumlah</th> <th>Satuan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6</td> <td>Kurni</td> <td>- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 50 cm - Non sertifikat</td> <td>521</td> <td>Batang</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Manggai</td> <td>- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 50 cm - Non sertifikat</td> <td>1.043</td> <td>Batang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.</p> <p>Kalimantan Selatan, 2025</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: x-small;">Pihak Pertama</p>  <p style="font-size: x-small;">Agustin A. Mustika Koordinator Program - Proyek Result Based Payment (RBP) REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Selatan</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p style="font-size: x-small;">Pihak Kedua</p>  <p style="font-size: x-small;">Mamat Hikmat Direktur CV CIPUTRI</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">4</p> </div> </div>	No	Jenis Bibit	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	1	Mangga	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Bersertifikat dan label biru	7.821	Batang	2	Alpukat	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 70 cm - Bersertifikat dan label biru	6.257	Batang	3	Matoa	- Bibit Seeding - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Non sertifikat	2.085	Batang	4	Nangka	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Bersertifikat dan label biru	1.564	Batang	5	Cempedak	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 70 cm - Non sertifikat	1.564	Batang	No	Jenis Bibit	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	6	Kurni	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 50 cm - Non sertifikat	521	Batang	7	Manggai	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 50 cm - Non sertifikat	1.043	Batang
No	Jenis Bibit	Spesifikasi	Jumlah	Satuan																																										
1	Mangga	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Bersertifikat dan label biru	7.821	Batang																																										
2	Alpukat	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 70 cm - Bersertifikat dan label biru	6.257	Batang																																										
3	Matoa	- Bibit Seeding - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Non sertifikat	2.085	Batang																																										
4	Nangka	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 80 cm - Bersertifikat dan label biru	1.564	Batang																																										
5	Cempedak	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 70 cm - Non sertifikat	1.564	Batang																																										
No	Jenis Bibit	Spesifikasi	Jumlah	Satuan																																										
6	Kurni	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 50 cm - Non sertifikat	521	Batang																																										
7	Manggai	- Bibit Okulasi - Tinggi bibit ≥ 50 cm - Non sertifikat	1.043	Batang																																										

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Sebagai bagian dari pemenuhan prinsip safeguard lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), proses pengadaan bibit tanaman dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian jenis tanaman dengan kondisi ekosistem setempat serta menghindari penggunaan spesies invasif. Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima Barang pengadaan bibit untuk kegiatan RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Selatan, jenis bibit yang diadakan meliputi mangga, alpukat, matoa, nangka, dan cempedak. Jenis-jenis tanaman tersebut merupakan tanaman buah yang umum dibudidayakan oleh masyarakat serta bukan termasuk dalam kategori spesies invasif yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem lokal.</p>
<p>ISP 7. Perlindungan dan Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat Hukum Adat</p>	-
<p>ISP 8. Perlindungan Warisan Budaya</p>	-
<p>ISP 9. Komitmen Lingkungan dan Sosial Bagi Lembaga Penyalur</p>	-
<p>ISP 10. Pelibatan Para Pemangku Kepentingan dan Pengungkapan Informasi</p>	<p>1. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan atau penerima manfaat tingkat tapak.</p>  <p>Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk pemenuhan prinsip safeguard BPDH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi. Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan sebelum implementasi dimulai.</p>

ISP	Deskripsi Kepatuhan
	<p>Program memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.</p> <p>Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum implementasi kegiatan periode tahun 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 1.2.1.1. Sosialisasi Penyusunan RKP RHL di KPH Kayu Tangi b) 3.1.1.3. Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalsel <p>2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan</p> <p>Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program periode 2025</p> <p>3. Publikasi Implementasi Program</p> <p>Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program periode 2025</p>
<p>ISP 11. Risiko Perpindahan Karbon</p>	<p>-</p>
<p>ISP 12. Kualitas Sosial Masyarakat, Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Kelompok Rentan</p>	<p>1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan</p>  <p>Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, hingga Bimtek)</p>

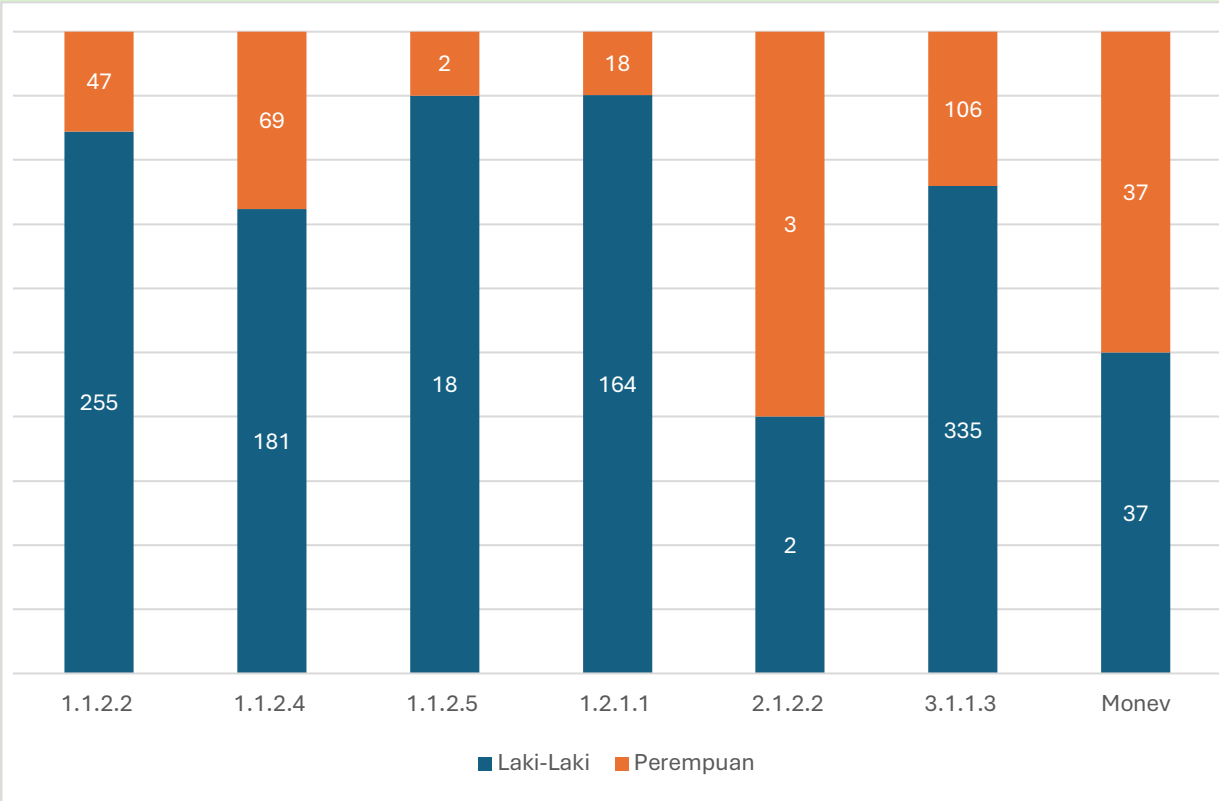
ISP

Deskripsi Kepatuhan



Pada periode pelaksanaan 2025, jumlah peserta perempuan mencapai 282 orang dibanding 992 laki-laki, sehingga tingkat keterlibatan perempuan berada pada kisaran 28,43% dari total peserta.

Berikut rincian data pelibatan gender periode implemementasi tahun 2025:



Nama Kegiatan	Laki - Laki	Perempuan	Persentase
1.1.2.2 Patroli pengamanan hutan	255	47	18,43%
1.1.2.4 Pembekalan dan pembinaan terhadap Masyarakat Peduli Api di 9 KPH dan 1 UPT Tahura	181	69	38,12%
1.1.2.5 Pembinaan MMP	18	2	11,11%
1.2.1.1 Penyusunan RKP RHL	164	18	10,98%
2.1.2.2 Pengembangan Silvopastora	2	3	150,00%
3.1.1.3 Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Kalsel	335	106	31,64%
Monitoring-Evaluasi Program RBP REDD+ Kalse	37	37	50%
TOTAL	992	282	28,43%

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program tahun 2025

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
1.1.1 Penyusunan/R evisi RPHJP di 4 KPH	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanaan kegiatan.
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara
1.1.2.2 Patroli penga manan hutan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanaan kegiatan.
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi 8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	Sebagai pelaksana kegiatan patroli pengamanan hutan
1.1.2.4 Pembekalan dan pembinaan terha dap Masyarakat Ped uli Api di 9 KPH dan 1 UPT Tahura	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanaan kegiatan.
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi 8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	Sebagai pelaksana kegiatan pembekalan dan pembinaan
1.1.2.5 Pembinaan MMP	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanaan kegiatan.
	KPH Tabalong	sebagai pelaksana kegiatan
1.2.1.1 Penyusunan RKP RHL	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanaan kegiatan.
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi 8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	Sebagai pelaksana penyusunan RKP RHL.

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
1.2.2.1 Penanaman	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	KPH Kayu Tangi	Sebagai pelaksana kegiatan
	Yayasan Penabulu	Sebagai Lembaga perantara
1.2.2.4 Pengawasan Kegiatan RHL	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi 8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	Sebagai pelaksana pengawasan RHL.
2.1.1.1. Peningkatan Kapasitas SDM KPS terkait operasionalisasi PS	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi 8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	Sebagai pelaksana kegiatan peningkatan kapasitas SDM
2.1.2.2 Pengembangan Silvopastoral	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	KPH Tanah Laut	Sebagai pelaksana kegiatan tingkat tapak
	Kelompok Tani Hutan (KTH) 1.KTH Gunung Birah 2.KTH Bumi Priangan	Sebagai penerima manfaat
3.1.1.3 Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	Kementerian Kehutanan RI	Sebagai narasumber kegiatan
	9 KPH dan 1 Tahura ; 1.KPH Tahura Sultan Adam 2.KPH Pulau Laut 3.KPH Sengayam 4.KPH Cantung 5.KPH Kusun 6.KPH Tanah Laut 7.KPH Kayu Tangi	Sebagai peserta kegiatan

KEGIATAN	STAKEHOLDER TERLIBAT	PERAN
	8.KPH Hulu Sungai 9.KPH Balangan 10. KPH Tabalong	
3.1.1.6 Supporting sekretariat Pokja REDD+	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	Yayasan Penabulu	Lembaga perantara
3.3.3.2 Pengadaan Barang untuk penyusunan peta jalan proklamasi Provinsi Kalimantan Selatan	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.
	PT. Bitekra Pilar Pratama	Sebagai Vendor Pengadaan Barang
Monev Triwulan	Yayasan Penabulu	Lembaga perantara
	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan	Sebagai pelaksana monev
	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.	Sebagai penanggungjawab kegiatan di Tingkat Provinsi dan pelaksanakegiatan.

Lampiran 2. Daftar publikasi program tahun 2025

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Dishut Kalsel Gelar Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+ untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7 November 2025	Instagram
Kalimantan Selatan	Video	Online	SOSIALISASI DAN KONSULTASI PUBLIK RENCANA PELAKSANAAN REDD+ PROV. KALSEL - DISHUT KALSEL	11 November 2025	https://youtu.be/gD6j2B5_hXs?si=JyRHF1kdZpyUQHfp
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Dishut Kalsel Gelar Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+ untuk Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	10 November 2025	https://dishut.kalselprov.go.id/2025/11/dishut-kalsel-gelar-sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd-untuk-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-28887
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Komitmen Pemprov Kalsel dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+	6 November 2025	https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1976799248/komitmen-pemprov-kalsel-dalam-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-melalui-sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Komitmen Kelola Hutan Berkelanjutan, Pemprov Kalsel Gelar Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+	7 November 2025	https://www.sonora.id/read/424316617/komitmen-kelola-hutan-berkelanjutan-pemprov-kalsel-gelar-sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel Mantapkan Langkah Menuju Hutan Lestari: REDD+ Jadi Senjata Lawan Krisis Iklim	6 November 2025	https://lenterakalimantan.net/news/kalsel-mantapkan-langkah-menuju-hutan-lestari-redd-jadi-senjata-lawan-krisis-iklim/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+, Komitmen Pemprov Kalsel dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	7 November 2025	https://redkal.com/berita/banjarmasin/sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd-komitmen-pemprov-kalsel-dalam-pengelolaan-hutan-berkelanjutan/

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel tegaskan komitmen pengendalian perubahan iklim melalui REDD+	6 November 2025	https://www.antaraneews.com/berita/5225057/kalsel-tegaskan-komitmen-pengendalian-perubahan-iklim-melalui-redd-
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Pemprov Kalsel Komitmen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Melalui Penerapan REDD+	6 November 2025	https://klikkalsel.com/pemprov-kalsel-komitmen-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-melalui-penerapan-redd/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel Dapat Dana REDD+ Rp3,4 Juta Dolar untuk Dukung Penurunan Emisi dan Rehabilitasi Hutan	7 November 2025	https://kalselmaju.com/2025/11/kalsel-dapat-dana-redd-rp34-juta-dolar-untuk-dukung-penurunan-emisi-dan-rehabilitasi-hutan/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Komitmen Pemprov Kalsel dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+	7 November 2025	https://dutatv.com/komitmen-pemprov-kalsel-dalam-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-melalui-sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Terima Dana REDD US\$3,4 Juta Kalsel Rehabilitasi Hutan dan Tangani Karhutla	6 November 2025	https://mediaindonesia.com/nusantara/827955/terima-dana-redd-us34-juta-kalsel-rehabilitasi-hutan-dan-tangani-karhutla
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel bertekad kelola Hutan Berkelanjutan melalui Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+	6 November 2025	https://www.wartaputrabalangan.com/2025/11/kalsel-bertekad-kelola-hutan.html
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Susah Payah Melindungi Hutan Kalsel, Paru Dunia yang Semakin Tersakiti	6 November 2025	https://esgnow.republika.co.id/berita/t5b9fp451/susah-payah-melindungi-hutan-kalsel-paru-dunia-yang-semakin-tersakiti-part5
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Pemprov Kalsel Serius Jaga Hutan, Tancap Gas Wujudkan Pembangunan Hijau	7 November 2025	https://shalokalindonesia.com/pemprov-kalsel-serius-jaga-hutan-tancap-gas-wujudkan-pembangunan-hijau/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Komitmen Pemprov Kalsel dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan melalui Sosialisasi dan Konsultasi Publik Rencana Pelaksanaan REDD+	6 November 2025	https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1976799248/komitmen-pemprov-kalsel-dalam-pengelolaan-hutan-berkelanjutan-melalui-sosialisasi-dan-konsultasi-publik-rencana-pelaksanaan-redd?page=2
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Gubernur Kalsel Tekankan Komitmen Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	6 November 2025	https://www.jejakborneonews.com/gubernur-kalsel-tekankan-komitmen-pengelolaan-hutan-berkelanjutan/

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Susah Payah Melindungi Hutan Kalsel, Paru Dunia yang Semakin Tersakiti	7 November 2025	https://sorotkabar.com/detail/11382/susah-payah-melindungi-hutan-kalsel-paru-dunia-yang-semakin-tersakiti
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel mulai langkah rehabilitasi hutan lewat penanaman kembali	27 November 2025	https://www.antaranews.com/video/5271217/kalsel-mulai-langkah-rehabilitasi-hutan-lewat-penanaman-kembali
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Gunakan REDD+ Kalsel Tanam Pohon Buah Hingga Ulin	27 November 2025	https://rri.co.id/daerah/2003101/gunakan-redd-kalsel-tanam-pohon-buah-hingga-ulin
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Hijaukan Banua, Pemprov Kalsel Kick Off Program REDD+	27 November 2025	https://rri.co.id/daerah/2002803/hijaukan-banua-pemprov-kalsel-kick-off-program-redd
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel pulihkan 250 hektare lahan kritis lewat Program RBP REDD+	27 November 2025	https://www.antaranews.com/berita/5271905/kalsel-pulihkan-250-hektare-lahan-kritis-lewat-program-rbp-redd
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Program REDD+ di Kalsel Percepat Pengurangan Lahan Kritis	27 November 2025	https://matabanua.co.id/2025/11/27/program-redd-di-kalsel-percepat-pengurangan-lahan-kritis/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kalsel Kick Off Program RBP REDD+ 2025, Tanam 250 Hektar untuk Tekan Laju Deforestasi	27 November 2025	https://banjarmasin.tribunnews.com/kalsel/1340094/kalsel-kick-off-program-rbp-redd-2025-tanam-250-hektar-untuk-tekan-laju-deforestasi
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	REDD+ Suntik Rp50 Miliar Kalsel Sebut Pemulihan Lahan Kritis	27 November 2025	https://economytravelling.com/2025/11/27/redd-suntik-rp50-miliar-kalsel-kebut-pemulihan-lahan-kritis/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Didukung Pendanaan Internasional, Kalsel Mulai Penanaman Program REDD+	27 November 2025	https://kalimantanpost.com/2025/11/didukung-pendanaan-internasional-kalsel-mulai-penanaman-program-redd/#google_vignette
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Lahan Kritis di Kalsel Turun Signifikan, Rehabilitasi Hutan Beri Dampak Nyata	27 November 2025	https://bakabar.com/post/lahan-kritis-di-kalsel-turun-signifikan-rehabilitasi-hutan-beri-dampak-nyata-mih3lxf/#google_vignette
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Program REDD+ Dimulai dari Banjarbaru, Kalsel Fokus Pulihkan Lingkungan Dan Dongkrak Ekonomi Warga	27 November 2025	https://lenterakalimantan.net/news/program-redd-dimulai-di-banjarbaru-kalsel-fokus-pulihkan-lingkungan-dan-dongkrak-ekonomi-warga/
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Pemprov Kalsel terapkan program tanam RBE seluas 100 hektare di Cempaka	27 November 2025	https://kalsel.antaranews.com/berita/494393/pemprov-kalsel-terapkan-program-tanam-rbe-seluas-100-hektare-di-cempaka

Provinsi	Kategori Berita	Media	Tema	Tanggal Publikasi	Link
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Terima Dana REDD US\$3,4 Juta Kalsel Rehabilitasi Hutan dan Tangani Karhutla	27 November 2025	https://mediaindonesia.com/nusantara/827955/terima-dana-redd-us34-juta-kalsel-rehabilitasi-hutan-dan-tangani-karhutla#google_vignette
Kalimantan Selatan	Artikel	Online	Kick Off Penanaman Program RBP REDD+ 2025 Digelar di Banjarbaru, Dorong Rehabilitasi 100 Hektare Lahan Kritis	27 November 2025	https://habarbanjar.com/2025/11/27/kick-off-penanaman-program-rbp-redd-2025-digelar-di-banjarbaru-dorong-rehabilitasi-100-hektare-lahan-kritis/

